

Implementasi Program Peningkatan Penerapan Teknologi dan Produksi Pala di Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Desmiati Arisandi Jacobus

Marthen L. Kimbal

Grace J. Waleleng

Abstract :

Implementation of the program to improve the application of technology and production of nutmeg in the sub-district west siau sitaro islands regency has experienced several problems such as the procurement prototype of nutmeg draining tool, construction of nutmeg drainage site, organic fertilizer procurement, provision of nutmeg seedlings, and lack of assistance and supervision Conducted by extension officers of agriculture / plantation. The purpose of this study was to find out why the Implementation of the program to improve the application of technology and production of nutmeg in the sub-district west siau sitaro islands regency has not gone well.

This research uses qualitative research method. The data source is primary data and secondary data. Primary data were obtained from direct interviews with 1 head of food and agriculture department of islands district of siau tagulandang biaro, 1 head of plantation, 1 head of production section and farmer's produce, 1 secretary of trade and labor industry service, 1 head sub extension program, 1 agricultural extension officer, 2 Head of Village, 1 Chairman and 9 Members of Farmer Group of Nutmeg. Secondary data was obtained from food and agriculture agency of siau tagulandang biaro regency in the form of data, documents, reading material and library materials related to this research. Data analysis is done by data reduction, data presentation, and conclusion.

The results showed that the organizational aspects related to the work unit that is related in the implementation of the program to improve the application of technology and production of nutmeg is the implementing agency of agricultural extension of plantation and forestry in this case the role of extension officers who are in fact not maximal. Not the establishment of extension officers in one sub-district so that the task of supervision and supervision by extension officers of agriculture / plantation is not maximal. This is due to the lack of resources of agriculture / plantation extension officers in the islands districts, especially in west districts. Aspects of interpretation relate to the understanding of extension officers of agriculture / plantation who understand that this program is very important and provide their own motivation in conducting socialization, counseling, mentoring and supervision. In contrast to the fact that supervision and supervision is very rare and not routinely conducted by extension officers of agriculture / plantation and lack of self-giving from agricultural extension officers in carrying out their duties also affect the course of the program. Aspects of application in this aspect of the problem is found at the agricultural extension implementing agency for plantation and forestry in this case the extension officers of agriculture / plantation who have not performed supervision and supervision tasks routinely, so that nutmeg farmers have not been able to apply technology and ways of processing nutmeg well automatically. Assistance provided is not used by nutmeg farmers because they do not dare to accept the risk that will occur due to misuse of the assistance provided.

Based on the conclusions from the results of the research and the discussion that has been suggested, it is necessary to suggest some things that is, Need additional extension of farmer / plantation extension in West Siau Subdistrict Siau Tagulandang Biaro District so that each village / one village has 1 (one) extension worker It is written in Law number 19 year 2013, so extension worker in doing socialization, counseling, mentoring and supervision activities can be done with maximum. It is incumbent on extension officers to be able to share their knowledge through study or research conducted to be transferred to the community in need in this case nutmeg farmers as beneficiaries of the program. Need to go down the field with a routine that is once a week doing mentoring and supervision.

Keyword: *implementation, technology implementation and Improvement Program production, Nutmeg*

PENDAHULUAN

Perkebunan adalah salah satu sektor pertanian. Perkebunan merupakan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai; mengolah, dan memasarkan hasil tanaman tersebut. Tanaman perkebunan yang ditanam pada umumnya berukuran besar dan waktu penanaman yang relatif lama. Waktu penanamannya antara kurang dari setahun

hingga bertahun-tahun. Salah satu komoditas perkebunan yang tidak hanya terkenal di Indonesia namun sampai ke Negara-negara luar seperti Eropa yaitu pala.

Pala (*Myristica Fragans Houtt*) merupakan tanaman asli Indonesia yang berasal dari kepulauan Banda dan Maluku. Pembudidayaan tanaman pala terus meluas sampai ke Sumatera. Daerah penghasil utama pala di Indonesia yaitu Kepulauan Maluku, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Nanggroe

Aceh Darusalam, Jawa Barat dan Papua. Sampai saat ini Indonesia termasuk salah satu negara produsen dan pengekspor biji dan fuli pala terbesar dunia. Pada umumnya pala mulai berbuah pada usia 7 (tujuh) tahun dan pada usia 10 (sepuluh) tahun telah berproduksi secara menguntungkan. Produksi pala akan terus meningkat dan pada usia 25 (dua puluh lima) tahun mencapai produksi tertinggi, dan terus berproduksi sampai usia 60-70 tahun (Hatta 1993:72).

Pala memiliki nilai ekonomi tinggi dan multiguna. Setiap bagian dari pala dapat dimanfaatkan mulai dari daging pala, biji pala, fuli pala, serta cangkang atau batok pala. Biji dan fuli pala dimanfaatkan sebagai bahan baku industri seperti penghasil minyak atsiri, bahan kosmetik, minuman serta rempah-rempah. Daging dari pala dapat diolah menjadi berbagai olahan yaitu asinan pala, manisan pala, sirup pala, serta dodol pala sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dari produk pala.

Peraturan menteri pertanian nomor 53/Permentan/OT.140/9/2012 tentang pedoman penanganan pascapanen pala dengan maksud penyusunan Pedoman Penanganan Pascapanen Pala ini yaitu, untuk memberikan acuan secara teknis tentang penanganan pascapanen pala dan fuli secara baik dan benar bagi para penyuluh, petugas di lapangan, petani/kelompok tani dan pelaku usaha lainnya. Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Pedoman Penanganan Pascapanen Pala yaitu untuk :

1. Meningkatkan mutu pala dan fuli;
2. Menekan kehilangan hasil atau susut hasil pala dan fuli;
3. Memudahkan dalam pengangkutan hasil pala dan fuli;
4. Meningkatkan efisiensi proses penanganan pascapanen pala dan fuli;
5. Meningkatkan nilai tambah hasil pala dan fuli yang dampaknya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani;
6. Meningkatkan daya saing produk pala dan fuli di pasar dunia.

Pala Indonesia sebagian besar dihasilkan oleh perkebunan rakyat yaitu sekitar 99%, dengan cara penanganan pascapanen yang masih tradisional dengan peralatan seadanya dan dilakukan kurang higienis. Masalah yang dihadapi pala Indonesia yaitu rendahnya mutu, dimana hal ini berpengaruh terhadap harga. Disamping itu rendahnya mutu pala Indonesia disebabkan oleh beragamnya jenis pala, waktu panen yang kurang tepat, penyimpanan dan pengemasan yang kurang baik serta tercampurnya dengan pala hutan. Waktu panen yang kurang tepat saat pala masih muda menyebabkan buah jadi keriput. Sedangkan penyimpanan dan pengemasan yang kurang baik memberi peluang jamur untuk tumbuh. Kondisi seperti ini mengakibatkan kualitas pala kurang baik yang dapat menurunkan kepercayaan para importir luar negeri terhadap Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya penolakan produk pala oleh negara Uni Eropa karena tercemar oleh *aflatoxin* pada periode tahun 2010-2011, dimana pala dari Indonesia mengandung *aflatoxin* melebihi kadar ambang yang diperbolehkan.

Berdasarkan peraturan menteri pertanian nomor 53/Permentan/OT.140/9/2012 Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, telah mengadakan beberapa program di bidang perkebunan bagi masyarakat khususnya petani pala, dalam rangka peningkatan mutu pala yakni :

1. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan

Kegiatan yang dilakukan yaitu melalui pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian / perkebunan tepat guna yaitu;

- a. Pengadaan prototipe alat pengering pala.
 - b. Pembangunan angunan pengeringan pala.
2. Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan

Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu melalui pengembangan bibit unggul

pertanian / perkebunan dan penyediaan sarana produksi, yaitu dengan pemberian bantuan kepada petani pala;

- a. Pengadaan bibit tanaman pala.
- b. Pengadaan pengadaan pupuk organik.

Program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2011 dengan melibatkan masyarakat petani pala yang dibentuk dalam suatu poktan atau kelompok tani. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No .82/Permentan/OT.140/8/2013, tentang pedoman pembinaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani menjelaskan mengenai kelompok tani yang selanjutnya disebut poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kondisi, lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kecamatan Siau Barat terdapat 14 kelompok tani pala yang dilibatkan dalam program ini yaitu, kelompok tani pala unity patola, singkahiking, makiwihing, paseng jaya II, suka maju bowongsalu, myristica fragans, bentane, baru mekar, mandiri, maju bersama, anugerah, berkat usaha, bersatu jaya, bunga pala, dengan jumlah keseluruhan anggota tani yaitu 186 orang tani pala.

Dalam pelaksanaan program didalamnya terdapat beberapa kegiatan yaitu pemberian bantuan kepada masyarakat petani pala yang tergolong dalam kelompok tani pala dengan harapan bantuan yang diberikan dapat membantu petani agar dalam proses penanganan pala mulai dari panen hingga pasca panen dapat ditangani dengan baik dan benar, karena mengingat cara pengolahan pala mulai dari panen hingga pasca panen yang dilakukan masyarakat masih tergolong tradisional, sehingga ada kemungkinan pala dapat terkontaminasi jamur dengan proses pengolahan yang seperti ini. Untuk itu dinas pangan dan pertanian memberikan bantuan berupa pengadaan prototipe alat pengering pala, pembangunan bangunan pengeringan

pala, pengadaan bibit dan pupuk organik, dengan harapan pemberian bantuan ini dapat di gunakan dan di terapkan selalu sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas pala siau.

Pulau Siau yang terletak di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Provinsi Sulawesi Utara, merupakan salah satu daerah penghasil pala terbaik, yang terkenal dengan nama "*Siau nutmeg*". Pala sudah menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dalam hal ini yaitu para petani pala di pulau Siau khususnya Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Sitaro. Berdasarkan observasi awal adapun informasi yang diperoleh melalui beberapa orang petani pala pada bulan november-desember 2016, harga pala mengalami penurunan beberapa kali, yakni dari 59.000/kg menjadi 55.000/kg dan turun menjadi 52.000/kg. Pada minggu ke III bulan january 2017 harga pala mulai merangkak naik yaitu berkisar 55.000-56.000/kg sedangkan untuk harga fuli pala juga mengalami penurunan dari harga sebelumnya 130.000/kg turun menjadi 100.000/kg.

Penurunan harga pala yang terjadi beberapa kali membuat petani sangat kesulitan dalam mengatur pengeluaran guna memenuhi kebutuhan hidupnya, belum lagi membayar upah buruh tani yang di pekerjakan untuk membantu memanen pala, serta keperluan lainnya. Hal ini sangatlah memprihatinkan, adapun informasi yang diperoleh melalui observasi awal yang peneliti lakukan, penurunan harga pala ini dikarenakan adanya pesaing dan ditemukannya *aflatoxin* (jamur) dalam pala Siau, jamur ini sangat berbahaya bagi kesehatan karena bisa menimbulkan penyakit kanker pada manusia, yaitu kanker hati (Yenny 2006), sehingga berdampak pada menurunnya harga pala.

Adapun hasil penelitian yang peneliti dapati yaitu, implementasi program peningkatan penerapan teknologi dan produksi pala di Kecamatan Siau Barat

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro belum berjalan dengan baik. Permasalahan yang diperoleh yaitu dalam pelaksanaan kegiatan yakni pemberian bantuan program seperti pengadaan prototipe alat pengeringan pala, pada tahun 2016 petani tidak menerima bantuan prototipe alat pengeringan pala tersebut, yang terjadi yaitu petani pala hanya di beritahukan akan diadakan alat pengeringan pala tapi belum tahu kapan kepastian pengadaan bantuan tersebut. Permasalahan selanjutnya yaitu, pembangunan tempat atau bangunan pengeringan pala, berdasarkan data yang diperoleh dari dinas pangan dan pertanian pada tahun 2016 di kelurahan Paniki Kecamatan Siau Barat telah dibangun 1 (satu) unit bangunan pengeringan pala namun kenyataannya petani pala tidak mengetahui adanya bangunan pengeringan pala tersebut.

Permasalahan lainnya yaitu dalam pengadaan pupuk organik, berdasarkan data yang diperoleh tidak ada penyampaian khusus kepada petani pala mengenai penggunaan pupuk yang baik dan benar sehingga dalam pemberian bantuan pupuk, petani tidak menggunakannya karena tidak berani mengambil resiko akibat kesalahan penggunaan pupuk. Permasalahan selanjutnya yaitu pada pengadaan bibit tanaman pala diketahui belum merata, karena ada petani pala yang dalam kelompok tani yang sama, namun tidak pernah memperoleh bantuan bibit pala tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara adapun permasalahan lainnya yaitu, kurangnya pendampingan saat melakukan penanaman bibit langsung di lokasi kebun petani pala dan juga untuk melakukan pengawasan secara rutin ke lokasi kebun petani pala tidak pernah dilakukan.

Kiranya pemerintah dalam hal ini dinas pangan, dapat lebih memperhatikan lagi implementasi program peningkatan penerapan teknologi dan produksi pala, agar dapat terlaksana dengan baik dan dapat mencapai tujuan program-program tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang ada maka, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Implementasi Kebijakan

Adapun Pemahaman yang sama menurut Edward III dan Sharskansky (dalam Kismartini 2006: 18) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah “apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam policy statement yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindak lanjut dengan program-program dan tindakan pemerintah.

Dalam buku *Policy Analysis for the Real World* oleh Brian Hogwood dan Lewis A. Gunn (1984:13-19), terdapat beberapa penggunaan kata kebijakan yaitu;

(1. *Policy as a label for a field of a activity*, 2. *Policy as an expression of general purpose or desired state of affairs*, 3. *Policy as specific proposals*, 4. *Policy as decisions of government*, 5. *Policy as formal authorization*, 6. *Policy as a programme*, 7. *Policy as output*, 8. *Policy as outcome*, 9. *Policy as a theory or model*, 10. *Policy as process*. Maksudnya (1. Kebijakan sebagai label untuk bidang kegiatan, 2. Kebijakan sebagai ungkapan tujuan umum atau keadaan yang diinginkan, 3. Kebijakan sebagai proposal spesifik, 4. Kebijakan sebagai keputusan pemerintah, 5. Kebijakan sebagai otorisasi formal, 6. Kebijakan sebagai sebuah program, 7. Kebijakan sebagai output, 8. Kebijakan sebagai hasilnya, 9. Kebijakan sebagai teori atau model, 10. Kebijakan sebagai proses.) .

Berdasarkan pemahaman tersebut pada poin 6 menegaskan bahwa kebijakan sebagai sebuah program, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan adalah segala sesuatu yang telah dipilih pemerintah untuk dilakukan baik dalam bentuk program atau

aturan-aturan untuk mencapai suatu tujuan. Seperti Lasswell (1970:71) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah (a projected program of goals values and practices).

Jones (1996:166) mengemukakan mengenai implementasi kebijakan, yaitu: *implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect* (implementasi adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu). Pengertian yang lebih jelas mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip oleh Wahab sebagai berikut : *Implementation is the carrying out of basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take important executive orders or court decision. Ideally that decision identifies the problem to be addressed, stipulates the objective to be pursued, and in a variety ways, "structures" the implementation process. The process normally runs through a number of stages beginning with passage of basic statute, followed by the policy outputs (decision) of the implementing agencies, the compliance of target groups with those outputs, the perceived impacts of agency decisions, and finally, important revision (or attempted revisions in the basic statute).* (Wahab, 2002:65)

Dengan demikian dalam pandangan Mazmanian dan Sabatier, implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung

setelah melalui sejumlah tahapan tersebut, biasanya diawali dengan tahapan 24 pengesahan undang-undang, kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan kebijakan oleh badan (instansi) pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dikehendaki dari *output* tersebut, dampak keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan tersebut.

Hal penting lainnya dalam implementasi kebijakan publik adalah: (a) harus berorientasi pada kepentingan umum, (b) dipahami oleh aparatur administrasi negara yang melaksanakan kebijakan, (c) diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan publik.

Ketiga prinsip pelaksanaan kebijakan tersebut menjelaskan bahwa pertama: organisasi merupakan penataan kembali terhadap sumberdaya-sumberdaya, unit-unit, dan metode-metode yang akan berpengaruh terhadap program; kedua : interpretasi berusaha menafsirkan supaya program menjadi rencana-rencana dapat diarahkan dengan tepat dan dimungkinkan diterima serta dilaksanakan; ketiga: penerapan merupakan aturan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lain-lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau instrument program.

1. Organisasi (Organization)

Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relative dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relative terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan (Robbins, 1994:4). Pendapat lain menurut Sutarto (2006:38-39) memberikan batasan organisasi yang didasarkan pada pendapat ahli dalam tiga kelompok yaitu memahami organisasi sebagai berikut;

- 1). Kumpulan orang
- 2). Proses pembagian kerja

3). Sistem kerja sama, sistem hubungan atau sistem sosial.

Sementara menurut L Barnard (1938) mengatakan bahwa organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih (*Define organization as a system of cooperative of two or more persons*) yang sama-sama memiliki visi dan misi yang sama. Senada dengan Paul Preston dan Thomas Zimmerer mengatakan bahwa organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok, yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. (*Organization is a collection people, arranged into groups, working together to achieve some common objectives*)

Organisasi menurut Siagian yang terdapat dalam silalahi (2009:123) bahwa istilah organisasi dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni:

- 1). Organisasi dapat dipandang sebagai wadah, yaitu tempat kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan dan sifatnya adalah relatif statis.
- 2). Organisasi dapat dipandang sebagai proses yaitu interaksi antara orang-orang yang menjadi anggota organisasi dan bersifat dinamis.

Dari beberapa pendapat ahli tersebut, silalahi (2009:123) memberikan penjelasan bahwa memahami organisasi sebagai wadah merupakan penggambaran jaringan hubungan kerja dan pekerjaan yang bersifat formal atas dasar kedudukan atau jabatan yang diperuntukan untuk setiap anggota organisasi. Olehnya organisasi merupakan susunan hirarki yang secara jelas menggambarkan garis wewenang dan tanggungjawab. Sehingga organisasi merupakan alat yang berstruktur permanen yang fleksibel (dimungkinkan dilakukan perubahan) sehingga apa yang terjadi dan akan terjadi dalam organisasi relatif tetap sifatnya dan karenanya dapat diperkirakan. Sementara itu organisasi sebagai proses pembagian kerja dan sistem kerja sama, sistem hubungan atau hubungan sosial tidak lain adalah organisasi sebagai

proses yang lebih bermakna sebagai aktivitas pengorganisasian (*organizing*).

2. Interpretasi

Pengertian Interpretasi menurut Jones (1984 : 296) adalah, menafsirkan agar program (serangkaian dalam status) menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan". Jadi interpretasi berkaitan erat dengan para pelaksana (*implementators*) untuk memahami apa yang harus mereka lakukan sesuai dengan yang seharusnya. Berkaitan dengan interpretasi suatu implementasi kebijakan publik. Lebih lanjut Jones (1984:320) mengemukakan bahwa masalah utama bagi seorang pelaksana adalah: "apa yang akan saya lakukan sekarang?" sebuah program telah disetujui, kalimat-kalimat telah tertera di atas kertas dan organisasi telah ada pada tempatnya. Sekarang saatnya untuk memahami maksud-maksud kalimat tersebut serta untuk menyiratkan apa yang mereka maksud tentang kasus-kasus khusus dan masalah-masalah nyata.

3. Aplikasi (Application)

Aplikasi adalah penerapan secara rutin dari segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan guna tercapainya tujuan suatu program. Menurut Jones (1984:296) Application: the routine provision of services, payment, or other agreed upon program objectives or instruments". Yang dimaksud aplikasi adalah; "ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Oleh karena itu aplikasi mengacu pada pelaksanaan pekerjaan yang meliputi penyediaan barang dan jasa".

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari manusia sebagai informan, guna mengetahui serta

menggambarkan kenyataan dari fenomena yang diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Sukmadinata (2009:53-60), menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dengan alasan terdapat kelompok tani pala yang melaksanakan program peningkatan penerapan teknologi dan produksi pala .

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong 2006:132). Dalam penelitian ini adapun yang menjadi Informan penelitian adalah mereka yang mewakili unsur:

1. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
Kepala Bidang Perkebunan
2. Kepala Seksi Produksi dan Hasil Tani
3. Sekertaris Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Tenaga Kerja
4. Mantan Pejabat Kepala Sub Bidang
Program Penyuluhan
5. Mantan Pejabat Petugas Penyuluh
Pertanian
6. Kapitalau /Lurah
7. Ketua dan Anggota Kelompok Tani Pala

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah implementasi program peningkatan penerapan teknologi dan produksi pala di Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Dengan memperhatikan faktor-faktor keberhasilan implementasi oleh Charles O. Jones (1984: 166), yaitu sebagai berikut:

1. Organisasi
2. Interpretasi
3. Aplikasi

E. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) sebagaimana yang dikutip oleh Lexi J. Moleong bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, ataupun dokumen-dokumen (Sutopo 2006:56-57). Data hasil penelitian didapatkan melalui 2 sumber data, yaitu:

1. Data primer dapat diperoleh dari wawancara langsung dengan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kepala Bidang Perkebunan, Kepala Seksi Produksi dan Hasil Tani, Sekertaris Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja, Mantan Pejabat Kepala Sub Bidang Program Penyuluhan, Mantan Pejabat Petugas Penyuluh Pertanian, Kapitalau / Lurah, Ketua dan Anggota Kelompok Tani Pala.
2. Data sekunder dapat peneliti peroleh dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berupa data-data, dokumen, bahan bacaan serta bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri. Dalam penelitian kualitatif peneliti ialah instrument utama. Peneliti berperan sebagai instrument utama sebab hanya manusia yang bisa berhubungan langsung dengan objek penelitian dan memahami kaitan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan (Suyanto dan Sutinah 2007: 186, dan Moleong 2012: 9). Sejalan dengan itu (Nasution 1996:55) mengatakan, "Manusia sebagai instrument utama dalam

penelitian kualitatif dipandang lebih serasi". Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan pedoman wawancara, tape recorder, kamera, dan lainnya.

Teknik pengumpulan data, yang digunakan yaitu :Wawancara , Observasi , Studi Dokumen

G. Tehnik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Silalahi 2009:339).

1. Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
2. Penyajian Data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan Kesimpulan berupa peninjauan kembali catatan-catatan lapangan, sehingga data-data yang dihasilkan dapat diuji validitasnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Organisasi

Pengorganisasian ini lebih ditekankan pada penataan sumberdaya-sumberdaya, unit kerja, dan metode-metode dalam implementasi program peningkatan penerapan teknologi dan peningkatan produksi pala. Pada aspek organisasi analisis yang dilakukan yaitu pada organisasi pelaksana atau yang mengimplementasikan program dan aspek sumberdaya yakni manusia, dana, sarana dan prasarana.

Program peningkatan penerapan teknologi dan peningkatan produksi ini memiliki tujuan yaitu memperkenalkan cara penerapan teknologi sederhana untuk penerangan pala sehingga menghasilkan pala yang bermutu dan bebas dari cemaran mikroorganisme yang berdampak pada

penurunan kualitas, dan meningkatkan produksi pala dengan pengadaan bibit unggul. Dari proses pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan observasi yang diperkuat dengan penggunaan dokumen maka diperoleh informasi dan data mengenai organisasi atau unit kerja yang berkaitan langsung dengan implementasi program peningkatan penerapan teknologi dan produksi pala di kecamatan siau barat kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro yaitu yang pertama, badan pelaksana penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan (BP4K) kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro.

Badan pelaksana penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan (BP4K) kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro memiliki peran untuk melakukan penyuluhan, pendampingan dan pengawasan. Peran ini dilaksanakan oleh petugas penyuluh pertanian/perkebunan. Berdasarkan data yang diperoleh badan pelaksana penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan (BP4K) telah menjalankan program sesuai peran mereka dalam hal ini melakukan penyuluhan mengenai cara penanganan pala mulai dari membuat bibit unggul, cara penanaman, jarak tanam, pemupukan, sampai pada panen hingga pasca panen, selain itu juga melakukan pendampingan dan pengawasan rutin di lapangan untuk memastikan agar program dapat berjalan dengan baik.

Kenyataan yang diperoleh dilapangan yaitu, peran dari badan pelaksana penyuluhan pertanian, perkebunan dan kehutanan kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro belum terlaksana dengan baik. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari beberapa orang anggota kelompok tani yang mengatakan bahwa selama melakukan proses panen hingga pasca panen tidak ada pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian, dan juga mengenai program yang diadakan tidak semua petani pala mengetahui mengenai program tersebut. Seperti pada

pemberian bantuan bibit unggul, bantuan tersebut langsung diserahkan di tiap-tiap kelurahan dan masing-masing lurah membagikannya kepada petani pala, Karena kurangnya pengawasan sehingga beberapa petani yang menerima bibit unggul ini hanya datang dan mengambil bibit tersebut dan belum menanamnya padahal sudah menerima bantuan tersebut dari tahun 2016.

Akibatnya tidak jarang ditemukan di pekarangan rumah beberapa petani ada bibit pala yang merupakan bantuan yang diberikan oleh dinas pangan dan pertanian belum di pindahkan untuk ditanami. Kurangnya pengawasan dan pendampingan ini juga mengakibatkan pemberian bantuan berupa pupuk tidak digunakan oleh petani pala. berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa tidak adanya penyampaian khusus mengenai penggunaan pupuk tersebut, sehingga masyarakat lebih memilih untuk tidak menggunakannya karena mereka tidak berani mengambil resiko jika tanaman pala mereka rusak ataupun mati. Pentingnya pendampingan dan pengawasann ini juga disadari oleh penyuluh pertanian, namun karena keterbatasan sumberdaya manusia dalam hal ini penyuluh pertanian sehingga pelaksanaan pendampingan dan pengawasan yang harusnya sering dilakukan oleh penyuluh pertanian menjadi tidak maksimal.

Dalam kaitannya dengan sarana pendukung implementasi program seperti dana dan peralatan menunjang sebagaimana data yang diperoleh bahwa sumber pendanaan program peningkatan dan penerapan teknologi dan peningkatan produksi ini berasal dari APBD kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro. Hasil wawancara dengan kepala dinas pangan dan pertanian mengatakan bahwa ketersediaan dana atau anggaran masih sangat terbatas, sehingga belum bisa menjangkau kepada semua petani. Informasi ini sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan bahwa tidak semua petani pala yang memperoleh atau mendapatkan bantuan padahal masih dalam kelompok tani

yang sama. Keterbatasan anggaran yang ada mengakibatkan tidak meratanya pemberian bantuan kepada petani pala.

Selain itu untuk melakukan pendampingan adapun biaya operasional yang bersumber dari APBN. Biaya operasional bisa dipake untuk biaya perjalanan atau bisa juga buat selebaran. Biaya yang diperoleh yaitu sebesar 400.000 per orang, namun jika dituntut untuk setiap hari turun lapangan untuk melakukan tugas penyuluh memang tidak mencukupi. Belum lagi tidak menetapnya penugasan 1 orang penyuluh pada 1 kampung karena sering dipindah-pindah ke lokasi atau kampung lain sehingga dapat mempengaruhi jalannya pengawasan dan pendampingan yang dilakukan. Kenyataan inilah yang dianggap menjadi penyebab sehingga implmentasi program peningkatan penerapan teknologi dan peningkatan produksi tidak berjalan dengan baik.

Organisasi atau unit kerja kedua yang berkaitan langsung dengan implementasi program peningkatan penerapan teknologi dan produksi pala di kecamatan siau barat kabupaten siau tagulandang biaro yaitu, dinas perindustrian, perdagangan dan tenaga kerja kabupaten kepulaua siau tagulandang biaro. Peran yang dilakukan oleh dinas perindustrian, perdagangan dan tenaga kerja yaitu melalui bidang perindustrian mengadakan pelatihan-pelatihan pengolahan turunan pala dimana ada kelompok kelompok yang di berikan pelatihan untuk membuat olahan turunan pala ini seperti misalnya untuk pembuatan anggur pala, dodol pala, sirup pala, permen pala, termasuk juga manisan dari pala dan ada beberapa olahan lain yang dihasilkan oleh pala melalui usaha kecil yang ditangani oleh bidang perindustrian yang juga bekerja sama dengan dinas pangan dan pertanian.

Sampai saat ini meskipun sudah mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan, namun minat masyarakat khususnya kaum wanita untuk menjadikan olahan turunan pala ini sebagai usaha kecil untuk membantu

perekonomian keluarga sangatlah minim. Tidak sedikit motivasi yang mengikuti pelatihan hanyalah untuk datang dan mengikuti pelatihan saja, namun untuk menerapkan apa yang didapati dari pelatihan-pelatihan tersebut tidak di terapkan. Memang sampai saat ini diketahui harga pala mengalami kenaikan setelah beberapa kali mengalami penurunan pada tahun 2016, berdasarkan data yang diperoleh selain kualitas pala menurun ada pula beberapa faktor yang mengakibatkan menurunnya harga pala yaitu;

1. Akibat dari penjualan pala
2. Disebabkan oleh cara jemuran pala
3. Pala yang belum waktunya untuk dipanen sudah dipanen
4. Disebabkan oleh perdagangan.

2. Interpretasi

Pada aspek Interpretasi analisis yang dilakukan yaitu bagaimana pemahaman dari unsur kepala seksi produksi dan hasil tani dinas pangan dan pertanian dan dari unsur petugas penyuluh pertanian / perkebunan sehubungan dengan implementasi program peningkatan penerapan teknologi dan produksi pala di kecamatan siau barat kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro.

Program peningkatan penerapan teknologi dan produksi pala merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki mutu atau kualitas pala, dengan melakukan kegiatan – kegiatan berupa pemberian bantuan bibit unggul, pemberian bantuan pupuk, dan juga pemberian bantuan prototipe alat pengeringan, melakukan koordinasi dengan unit kerja yang ada. Kenyataan yang ada masih banyak petani pala yang belum menerapkan teknologi pertanian yang di anjurkan oleh dinas pangan dan pertanian, serta bantuan- bantuan yang diberikan tidak di gunakan oleh petani pala penerima manfaat.

Dasar peraturan implementasi program peningkatan penerapan teknologi dan produksi pala yaitu, PP no 53 tentang

pedoman penanganan pasca panen pala. Dalam kaitannya dengan aspek interpretasi dari para implementor sehubungan dengan pelaksanaan program peningkatan penerapan teknologi dna peningkatan produksi pala dari hasil wawancara di peroleh data bahwa;

1. Pemahaman dari unsur kepala seksi produksi dan hasil tani dinas pangan dan pertanian kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro, menyatakan bahwa program ini sangat penting, program ini dapat membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh petani pala saat ini yaitu mengenai menurunnya kualitas pala siau yang berdampak pada harga pala yang mengalami penurunan beberapa kali pada tahun 2016. Dengan adanya program ini masyarakat petani pala dapat memperoleh cara pengolahan pala yang baik dan benar mulai dari panen hingga pasca panen, selain itu adapun bantuan-bantuan yang diberikan kepada petani pala guna diterapkan. Permasalahan yang ditemui yaitu dalam pemberian bantuan ada petani pala yang tidak menggunakan bantuan tersebut dengan berbagai alasan, seperti contoh model alokasi pupuk kadangkala ada keterbatasan petani, mereka takut menggunakan pupuk karena sebelumnya tidak terbiasa menggunakan pupuk. Meskipun ada upaya dari dinas untuk memberikan penjelasan dan meyakinkan bahwa tidak apa-apa menggunakan pupuk, namun untuk merubah kebiasaan seseorang memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Untuk peningkatan produksi di alokasikan pupuk, setelah ada pendampingan dan penjelasan mereka sudah mulai menggunakan meskipun ada 1, 2 yang tidak berani menggunakan pupuk. Tapi sudah ada upaya dari dinas terkait untuk meyakinkan petani mengenai dosisnya, cara pakai, waktu pemupukan dan sebagainya.

2. Pemahaman dari unsur petugas Penyuluh Pertanian / perkebunan terhadap pentingnya pelaksanaan program peningkatan penerapan teknologi dan peningkatan produksi pala yaitu, karena pertama untuk kesejahteraan petani sebagai pelaku utama, yang kedua yaitu peningkatan produksi pala sebagai produk unggulan. Selaku penyuluh pentingya program ini juga memberikan motivasi tersendiri untuk kami dalam melakukan peran sebagai penyuluh pertanian yaitu melakukan pendampingan pada petani pelaku utama dalam hal ini pekebun, pendampingan yang dilakukan secara rutin 1 minggu sekali dalam bentuk pribadi maupun kelompok, melakukan penyuluhan-penyuluhan mengenai peningkatan produksi mulai dari pembuatan bibit sampai pada penanganan pasca panen.

Data dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa interpretasi para implmentor mengenai program peningkatan penerapan teknologi dan peningkatan produksi pala di kecamatan siau barat kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro sejalan dengan tujuan pelaksanaan program ini yaitu memperkenalkan cara penerapan teknologi sederhana untuk pengeringan pala sehingga menghasilkan pala yang bermutu dan bebas dari cemaran mikroorganisme yang berdampak pada penurunan kualitas, dan meningkatkan produksi pala dengan pengadaan bibit unggul. Pendapat-pendapat yang tepat tersebut memiliki keterkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh implementor. Kemampuan ini terlihat dari jabatan atau kedudukan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan serta pengalaman-pengalaman dalam menjalankan tugas dengan jabatan yang diberikan.

Kendala yang ada pada kecamatan siau barat kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro dalam pelaksanaan program peningkatan penerapan teknologi dan produksi pala yaitu yang pertama,

kurangnya sumber daya manusia dalam hal ini penyuluh pertanian. Jumlah penyuluh pada tahun 2015 terdapat ada 24 orang penyuluh, tahun 2016 jumlah penyuluh berkurang menjadi 14 orang, dan kini jumlah penyuluh yang tersisa yaitu 9 orang penyuluh pertanian. Untuk wilayah siau terdapat 6 orang penyuluh pertanian, dan 3 orang penyuluh pertanian wilayah tagulandang dan biaro. Jumlah penyuluh ini sangat sedikit jika mengikuti Undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, pada pasal 46 ayat 4 tertulis penyediaan penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh dalam 1 (satu) desa. Selain itu kurangnya pemberian diri dari penyuluh pertanian lainnya sangat mempengaruhi dalam menjalankan tugas penyuluhan, belum lagi jika dikaitkan dengan salah satu permasalahan yang dikemukakan dalam aspek organisasi yaitu keterbatasan dana dan anggaran pendampingan yang diterima oleh penyuluh diakui tidak mencukupi jika dituntut untuk setiap hari turun lapangan melakukan pendampingan dan pengawasan.

Kendala yang kedua yaitu masyarakat dalam hal ini yaitu petani pala yang tergolong dalam kelompok tani, diketahui bahwa ketidakseragaman terlihat dari aspek perilaku penerima manfaat yang kadangkala masih ada penolakan yang muncul untuk mau menerima atau mau menggunakan bantuan yang diberikan, kadangkala nanti diingatkan kenapa tidak digunakan. Selain itu kendala lain juga yaitu budaya yang ada dan masih diterapkan oleh masyarakat yaitu masih menggunakan cara-cara lama atau tradisional. Untuk merubah kebiasaan tersebut tidak semudah membalikan telapak tangan seperti contoh, kebiasaan-kebiasaan seperti pasaca panen cara menjemur, karena selama ini proses penjemuran dilakukan di atas tanah atau jalan dengan hanya menggunakan karung atau terpal lalu pala di gelar di atasnya.

Kebiasaan-kebiasaan seperti ini sangat sulit untuk merubahnya, meskipun sudah ada

penyuluhan yang dilakukan beberapa kali mengenai proses penjemuran dengan menggunakan alat pengeringan pala atau prororipe alat pengering pala yang terbuat dari kayu dengan sistem rak atau biasa disebut oleh petani pala dengan sebutan “para-para”. Sehingga tahun 2016 diusahakan pengadaan prototipe alat pengering dan di tahun 2017 ini dilakukan pengadaan prototipe alat pengeringan pala bagi masyarakat namun belum begitu modern tapi cukup lumayan yaitu para-para pengering pala yang tidak langsung bersentuhan dengan tanah, sekitar 50cm tingginya agar supaya menjaga mutu pala tersebut, sehingga manfaat nantinya pala tidak lagi dikomplein mengenai kualitas karena sudah dijaga mutunya melalui penerapan teknologi pertanian sederhana ini.

3. Aplikasi

Aspek aplikasi pada penelitian ini lebih difokuskan pada petunjuk pelaksanaan / dasar kebijakan, standar operasional prosedur, dan pengawasan yang semuanya di dasarkan pada data yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara dan penggunaan dokumen.

Dasar peraturan implementasi program peningkatan penerapan teknologi dan produksi pala yaitu, PP no 53 tentang pedoman penanganan pasca panen pala. Alur Kerja diawali dengan melakukan identifikasi kelompok-kelompok petani pala penerima bantuan, setelah itu dinas pangan dan pertanian bekerjasama dengan badan pelaksana penyuluh pertanian perkebunan dan kehutanan untuk melakukan sosialisasi dan pendataan calon petani calon lahan. Identifikasi data diperoleh dari salah satu kampung lahan sebesar 5 hektar dilakukan pengecekan, jika benar ada di akomodir dalam program, sampai pada proses sk, seterusnya baru di serahkan pada petani. Dalam Proses ini tidak serta merta langsung menetapkan penerima bantuan tetapi melibatkan penyuluh untuk dapat mengecek kebenaran data yang diterima setelah itu dilakukan konfirmasi ke pemerintah kampung

untuk mengecek kebenaran data yang telah di terima. Pengecekan dilakukan langsung oleh penyuluh, kemudian setelah itu diproses dan diolah lagi datanya lalu dibuatkan SK bupati, kemudian sarana-sarana yang disiapkan misalnya anggaran yang akan disalurkan dalam jumlah diatas 200 dipihak ketigakan, tetapi harus ada SK bupati, kemudian dari dinas pangan dan pertanian membuat spesifikasi barang yang selanjutnya di pihak ketigakan lalu disalurkan kepada masyarakat pengguna (kelompok tani) namun tidak seluruh kelompok tani.

Sebelumnya dilakukan evaluasi dahulu jika lokasi yang sudah pernah difasilitasi maka untuk selanjutnya tidak di salurkan lagi bantuan jadi penyaluran bantuan dilakukan secara bergilir, tidak selalu harus dikampung tersebut. jadi tidak sertamerta program itu dpusatkan pada 14 kelompok tani saja, misalnya dilihat dari sisi pasaca panenya perlu disentuh berate di penerapan teknologi menyangkut kebutuhan bibit dari sisi peningkatan produksi. Berdasarkan wawancara diperoleh data penyaluran bantuan misalnya dampak kekeringan tahun lalu diperoleh data berapa banyak pohon pala yang mengalami kekeringan karena terkena dampak kemarau panjang, walaupun kampung tersebut sudah menerima namun tetap ada pendampingan. jadi harus betul-betul punya lahan jangan tidak punya lahan diberikan bantuan, khusus bantuan ini kita juga sikngriionkan dengan usulan-usulan kegiatan musrembang, misalnya kampung a mengusul ini diidentifikasi apakah betul, kalau sudah menerima bantuan tersbut , tahun berikut tidak lagi menerima bantuan yang sama, seperti alat pengering tidak setiap petani menerima karena bantuan ini contoh swadaya lah bagi petani pala.

Adapun upaya dinas pangan dan pertanian yaitu memperkenalkan cara penerapan teknologi sederhana untuk pengeringan pala sehingga menghasilkan pala yang bermutu bebas dari cemaran-cemaran mikroorgansime yang berdampak pada

penurunan kualitas, dan mempertahankan ataupun meningkatkan produksi dengan adanya pengadaan pupuk organik, mempertahankan propduksi dengan memanfaatkan bibit unggul.

Dari berbagai kegiatan yang dilakukan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program peningkatan penerapan teknologi dan peningkatan produksi ini bahwa sulitnya merubah kebiasaan-kebiasaan masyarakat petani pala yang masih menggunakan cara pengolahan pala secara tradisional, banyak petani dan pengumpul tidak memiliki sarana pengeringan dan penyimpanan biji pala yang memadai. Umumnya mengandalkan penjemuran dengan sinar matahari di pekarangan, dengan beralaskan karung atau terpal dan dijemur diatas tanah atau jalan. Hal ini menjadi masalah besar ketika musim penghujan, para petani akan mengalami kesulitan untuk proses pengeringan dan penyimpanannya, karena dengan kondisi udara yang lembab dan basah sangat memungkinkan produk pala terjangkit hama jamur. Disinilah *aflatoksin* menjadi ancaman produk yang perlu diwaspadai. Padahal pemerintah telah mengadakan bangunan pengeringan pala yaitu sarana pengeringan pala dengan kapasitas yang lebih besar dalam ruangan dengan sistem rak dan dikombinasikan dengan penggunaan tungku sebagai sumber panas.

Kendala kedua yaitu jarak tanam yang sangat rapat dan tidak sesuai dengan sistem budidaya anjuran dapat memicu penurunan produktivitas dan kualitas pala yang dihasilkan. Beberapa tanaman yang tidak beraturan umunya berasal dari biji pala jatuhan. Kerapatan yang tinggi mengakibatkan pencahayaan berkurang, sehingga tanaman akan cenderung menjulang keatas dan daya tumbuh buah pala juga akan semakin jauh dari tingkat batang pohon, sehingga buah akan sulit diakses ketika pemanenan.

Kendala lain juga petani kurang terampil atau kurang peduli dalam memilih

buah pala yang siap dipanen padahal hanya buah yang sudah tua yang dapat menghasilkan biji kering dan mutu tinggi. Petani perlu mengidentifikasi buah tua karena buah pala tidak muncul serentak melainkan dalam beberapa gelombang sehingga panennya pun harus dipilih yang sudah tua saja. Buah yang belum cukup tua tidak akan menghasilkan biji pala dengan mutu ekspor meskipun ditangani dengan baik karena akan mengkerut (*shrivled*) setelah dikeringkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota petani pala, pemetikan atau pemanenan pala bukanlah disengaja dengan melakukan pemanenan terhadap buah pala yang belum siap untuk di panen, namun karena maraknya pencurian pala yang dilakukan oleh beberapa orang sehingga petani pala lebih memilih memanen pala yang masih belum waktunya dipanen. Hal ini juga diperkuat dengan pengamatan peneliti bahwa pemanenan yang dilakukan oleh petani pala memang belum waktu panen sudah dipanen, yaitu seminggu sebelum dipanen, hal ini dikarenakan beberapa kejadian yang dialami oleh petani pala yang menunggu waktu tepat untuk panen tetapi pada saat siap untuk memanen buah pala sudah di panen (dicuri) orang. Selain itu juga berdasarkan pengalaman peneliti dalam melakukan pemanenan pala tidak sepenuhnya pala yang dipetik adalah pala yang tua atau siap panen namun karena menggunakan galah sehingga seringkali pala yang muda atau belum siap panen juga ikut terbawa.

Kendala selanjutnya yaitu, Petani juga kurang memperhatikan kebersihan dalam penanganan pascapanen, mulai dari peralatan yang digunakan dan lingkungan kerja yang kotor. Minimnya perhatian terhadap kebersihan menyebabkan biji pala basah banyak terkontaminasi jamur *Aspergillus*, yang akan berkembang ketika lingkungan mendukung. Kenyataannya memang pelaksanaan program peningkatan penerapan teknologi dan peningkatan produksi telah dilakukan dengan berbagai kegiatan- kegiatan

seperti pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian / perkebunan tepat guna dengan memberikan bantuan pengadaan prototipe alat pengering pala dan pembangunan bangunan pengeringan pala yang adalah sarana pengeringan dengan kapasitas yang lebih besar dalam ruangan dengan sistem rak dan dikombinasikan dengan penggunaan tungku sebagai sumber panas tambahan. Kegiatan lain juga adalah pengembangan bibit unggul pertanian / perkebunan dengan memberikan bantuan pengadaan bibit tanaman pala untuk merehabilitasi tanaman pala yang terkena dampak kemarau panjang. Adapun kegiatan penyediaan sarana produksi dengan memberikan bantuan pengadaan pupuk organik.

Untuk menunjang kegiatan-kegiatan tersebut agar dapat terlaksana dengan baik adapun upaya yang dilakukan oleh dinas pangan dan pertanian yaitu melakukan pendampingan dan pengawasan dengan rutin seminggu sekali melalui unit kerja yang terkait yaitu badan pelaksana penyuluh pertanian perkebunan dan kehutanan (BP4K). Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan anggota kelompok tani pala diperoleh informasi bahwa pendampingan hanya dilakukan pada saat pembuatan bibit, namun pada saat penanaman tidak ada pendampingan bahkan pengawasan tidak pernah dilakukan, karena lokasi kebun yang sangat jauh dari akses jalan raya dan medan yang sangat berbahaya sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi juga pengawasan dan pendampingan dari penyuluh. Mengenai bangunan pengeringan pala sendiri berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa anggota kelompok tani pala diperoleh bahwa mereka tidak pernah mendengar bahkan tidak tau mengenai keberadaan bangunan pengeringan pala di kecamatan siau barat.

Dengan memperhatikan aspek aplikasi, alur kerja program peningkatan penerapan teknologi dan peningkatan

produksi pala khususnya dalam penyaluran bantuan telah terlaksana sesuai dengan prosedur penyaluran. Akan tetapi dalam pelaksanaan kerja permasalahan ditemukan pada badan pelaksana penyuluh pertanian perkebunan dan kehutanan yang belum melaksanakan tugas pengawasan dan pendampingan dengan rutin, sehingga petani pala belum dapat menerapkan teknologi dan cara-cara pengolahan pala yang baik dan benar dengan sendirinya. Permasalahan lainnya yaitu kurangnya sumberdaya penyuluh yang mengakibatkan tidak menetapnya tugas pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian pada satu kampung, dan kurangnya dana / anggaran untuk melakukan tugas pendampingan dan pengawasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi program peningkatan penerapan teknologi dan produksi pala di kecamatan siau barat kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro ialah sebagai berikut :

1. Aspek Organisasi berkaitan dengan unit kerja yang berhubungan dalam implementasi program peningkatan penerapan teknologi dan peningkatan produksi pala yaitu badan pelaksana penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan dalam hal ini peran dari petugas penyuluh yang kenyataannya tidak maksimal. Tidak menetapnya petugas penyuluh pada satu kecamatan sehingga tugas pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh petugas penyuluh pertanian/perkebunan tidak maksimal. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya sumber daya petugas penyuluh pertanian/perkebunan di kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro khususnya di kecamatan siau barat.
2. Aspek Interpretasi berkaitan dengan pemahaman petugas penyuluh

- pertanian/perkebunan yang memahami bahwa program ini sangat penting dan memberikan motivasi tersendiri bagi mereka dalam melakukan sosialisasi, penyuluhan, pendampingan dan pengawasan. Berbeda dengan kenyataan yang ada bahwa pendampingan dan pengawasan sangat jarang dan tidak rutin dilakukan oleh petugas penyuluh pertanian/perkebunan dan kurangnya pemberian diri dari petugas penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugasnya juga mempengaruhi jalannya program.
3. Aspek Aplikasi dalam aspek ini permasalahan didapati pada petugas penyuluh pertanian/perkebunan yang belum melaksanakan tugas pengawasan dan pendampingan dengan rutin, sehingga petani pala belum dapat menerapkan teknologi dan cara-cara pengolahan pala yang baik dan benar dengan sendirinya. Bantuan yang diberikan tidak digunakan oleh petani pala karena tidak berani menerima resiko yang nantinya akan terjadi karena kesalahan penggunaan bantuan yang diberikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka perlu disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Program peningkatan penerapan teknologi dan peningkatan produksi merupakan salah satu program pemerintah yang bermanfaat bagi petani pala, untuk itu perlu tambahan petugas penyuluh pertanian/perkebunan di Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro agar setiap desa/satu kampung memiliki 1 (satu) orang petugas penyuluh seperti yang tertulis dalam UU nomor 19 tahun 2013, sehingga tugas penyuluh dalam melakukan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pendampingan dan pengawasan dapat dilakukan dengan maksimal.
2. Menjadi kewajiban bagi petugas penyuluh untuk dapat membagi ilmu yang diperolehnya melalui studi ataupun penelitian yang dilakukan untuk ditransfer kepada masyarakat yang membutuhkan dalam hal ini petani pala selaku penerima manfaat program Peningkatan Penerapan Teknologi dan Peningkatan Produksi.
3. Selain memberikan sosialisasi dan penyuluhan, petugas penyuluh pertanian/perkebunan perlu turun lapangan dengan rutin yaitu 1 minggu sekali melakukan pendampingan dan pengawasan ataupun untuk memberikan contoh bagaimana melakukan cara pengolahan pala yang baik dan benar sesuai dengan penyampaian yang diberikan saat sosialisasi dan penyuluhan yang telah diadakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Edward III, George C.1980. *Implementing Public Policy, Congressional Quarterly Press*, Washington.
- Hatta, S.1993.*Budidaya Pala*.Yogyakarta: Kanisius.
- Hogwood B.W and Gunn L.A. 1984.*Policy Analysis for the Real World*.Oxford University Press. New York
- Jones, Charles O. 1984. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Editor Nashir Budiman. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy. Terjemahan Rick Ismanto*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Kismartini. M. 2006. *Implementasi kebijakan Publik*. Yogyakarta
- Lofland, John dan Lyn H Lofland.1984.*Analyzing social settings, a guide to qualitative observation and analysis*, Belmont.Cal:Wards worth publishing company..
- Moleong,L.J.2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung :PT Remaja Rosdakaryag

Nasution, S. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik – Kualitatif*. Bandung : Tarsito

Nawawi, I.2009.*Public Policy : Analisis, Strategi, Advokasi Teori dan Praktek*.Surabaya: PMN

Nawawi, dan Martini.1991.*Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press

Robbins, S, P. 1994. *Teori Organisasi : Struktur, Desain dan Aplikasi*. Alih Bahasa Jusuf Udaya. Jakarta: Arcan

Silalahi, U. 2009. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.

Silalahi, U.2009.*Metode Penelitian Sosial*.Bandung:Pt.Refika Aditama

Sukmadinata, Nana Syaodih.2009.*Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.

Sutarto. 2006. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta : Gajah Mada Press

Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta. UNS

Suyanto, B dan Sutinah (ed). 2007. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*.Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Wahab. 2002. *Analisis Kebijakan, Dari formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Askara

PERMEN, SK BUPATI, DAN UNDANG-UNDANG

Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 53/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Pala.

Peraturan Menteri Pertanian No .82/Permentan/OT.140/8/2013, tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.

SK Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 154 tahun 2016

tentang Penetapan Nama-Nama Kelompok Tani Penerima Bangunan Pengeringan Pala Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2016

SK Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 155 tahun 2016 tentang Nama-Nama Kelompok Tani Penerima Prototipe Alat Pengering Pala Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2016

SK Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 164 tahun 2016 tentang Nama-Nama Petani Penerima Bibit Tanaman Pala Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2016

Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani